

Pengaruh Penerapan *Good Governance*, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Sistem Pengendalian Internal, Peran Audit Internal dan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah

(Studi Kasus Kantor Dinas Kabupaten Musi Rawas Propinsi Sumatera Selatan)

TESIS

Diajukan Guna Memenuhi Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Magister pada Program Magister Akuntansi



Disusun Oleh:

Ari Puspita Yuriyana

121900643

**PROGRAM PASCASARJANA
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI
YAYASAN KELUARGA PAHLAWAN NEGARA
YOGYAKARTA**

2022

PENGARUH PENERAPAN GOOD GOVERNANCE, SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH, SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL, PERAN AUDIT INTERNAL DAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN DAERAH (Studi Kasus Kantor Dinas Kabupaten Musi Rawas Propinsi Sumatera Selatan)

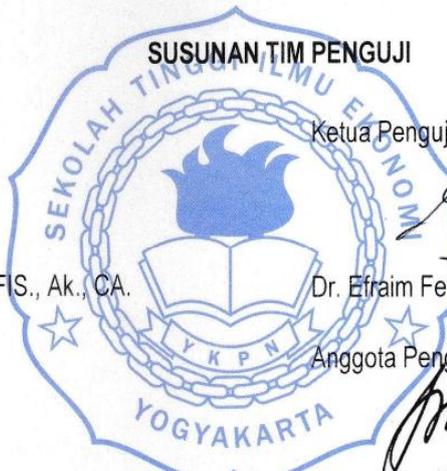
dipersiapkan dan disusun oleh:

Ari Puspita Yuriyana

Nomor Mahasiswa: 121900643

telah dipresentasikan di depan Tim Penguji pada tanggal: 3 Agustus 2022 dan dinyatakan telah memenuhi syarat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk mencapai gelar Magister Akuntansi (M.Ak.) di bidang Akuntansi

SUSUNAN TIM PENGUJI

Pembimbing  Dr. Wing Wahyu Winarno, MAFIS., Ak., CA.		Ketua Penguji  Dr. Efraim Ferdinan Giri, M.Si., C.M.A., Ak., CA. Anggota Penguji  Dr. Nurofik, M.Si., C.M.A., Ak., CA.
--	--	--

Yogyakarta, 3 Agustus 2022
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN
Ketua,



Dr. Wisnu Prajogo, MBA.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Pengaruh Penerapan *Good Governance*, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Sistem Pengendalian Internal, Peran Audit Internal dan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah

(Studi Kasus Kantor Dinas Kabupaten Musi Rawas Propinsi Sumatera Selatan)

Ari Puspita Yuriyana

(Mahasiswa STIE YKPN Yogyakarta)

Dr. Wing Wahyu Winarno

(Dosen STIE YKPN Yogyakarta)

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh penerapan *good governance*, sistem akuntansi keuangan daerah, sistem pengendalian internal, peran audit internal dan kompetensi SDM terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah Kasubag Kepegawaian, Kasubag Keuangan, Bendahara Pengeluaran dan Staf Penatausahaan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas sejumlah 26 OPD. Metode penentuan sampel dengan metode sensus, sehingga seluruh anggota populasi dijadikan sebagai sampel penelitian sejumlah 104 responden. Data dalam penelitian ini adalah data primer dengan teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner. Pengujian hipotesis menggunakan PLS dengan bantuan program *Smart pls*. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa penerapan *good governance*, peran audit internal dan kompetensi SDM berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Sedangkan sistem akuntansi keuangan daerah dan sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.

Kata Kunci : Kualitas laporan keuangan *good governance*, sistem akuntansi keuangan daerah, sistem pengendalian internal, peran audit internal dan kompetensi SDM

PENDAHULUAN

Laporan keuangan yang berkualitas merupakan suatu keharusan bagi pemerintah daerah. Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah mencerminkan tertib dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah, yaitu tertib administrasi dan ketaatan pada prinsip. Kualitas informasi dalam laporan keuangan pemerintah dipengaruhi oleh kepatuhan terhadap standar akuntansi dan didukung oleh sistem akuntansi yang andal (Andini dan Yusrawati, 2015). Laporan keuangan berkualitas memiliki karakteristik relevan, andal, sebanding, dan mudah dipahami. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 yang dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi pengguna dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dilakukan dengan cara laporan keuangan pemerintah disusun dan disajikan harus memenuhi prinsip-prinsip Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP) yang nantinya dapat dipertanggungjawabkan untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan pemerintah (Yusniar, Darwanis dan Abdullah, 2016). Proses pengujian laporan keuangan pemerintah daerah dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan. Laporan tentang hasil pengujian pemerintah daerah dilakukan oleh BPK dan selalu melakukan penilaian setiap tahun terhadap laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) yang berupa opini, yang terdiri dari empat opini, yaitu: Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Opini Tidak Wajar (TP), dan Pernyataan Menolak Memberi Opini atau Tidak Memberi Pendapat (TMP).

Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah adalah *good governance*. *Good Governance* adalah hal yang menjadi perhatian atas organisasi pemerintah dalam melakukan tata kelola keuangan negara agar tercipta kualitas pelayanan publik yang lebih baik dan bersih. Pemerintah mempunyai tujuan dalam menjalankan tugasnya untuk merencanakan atau membangun daerah agar tercapainya suatu bentuk keberhasilan. Dalam mencapai tujuan tersebut pemerintah daerah wajib untuk melakukan pengelolaan terutama keuangan. Namun pada kenyataannya permasalahan di dalam laporan keuangan daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah terhadap publik dan masyarakat yang masih menyisakan

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

permasalahan dan keraguan akan kebenarannya. Tindakan ini tidak hanya di pusat tapi juga di daerah. Modus yang digunakan yaitu kasus suap, mark up anggaran belanja, hingga jual beli jabatan (Azlim, Darwanis, & Usman, 2012).

Selain itu faktor kedua yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah adalah pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah. Peraturan pemerintah Nomor 65 tahun 2010 yang merupakan perubahan dari PP Nomor 56 tahun 2005 tentang sistem informasi keuangan daerah menyatakan bahwa sistem informasi keuangan daerah adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, penatausahaan, pengolahan data dan pengelolaan keuangan daerah. Informasi terkait lainnya menjadi informasi yang disajikan kepada publik dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pertanggungjawaban pemerintah daerah. Pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan dapat mengefektifkan penyusunan pelaporan dan dapat mengoptimalkan pengguna laporan dalam pengambilan keputusan. Penelitian (Evi dan Setiawina, 2016) menyebutkan bahwa pemanfaatan informasi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah dalam hal pengelolaan keuangan daerah secara baik, harus dilakukan dengan menyadari tujuan pemerintah yang bersih (*clean governance*) dimana pengelola keuangan yang baik merupakan kemampuan pengendalian kebijakan keuangan daerah yang ekonomis, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel. Mardiasmo (2002) menyatakan bahwa sistem pertanggungjawaban keuangan suatu lembaga yang dapat berjalan dengan baik, jika ada mekanisme manajemen keuangan yang baik juga. Itu berarti pengelolaan keuangan daerah yang tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja yang memiliki strategis dalam mewujudkan pemerintah yang baik dan akuntabel.

Selain itu faktor yang ketiga yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan adalah sistem pengendalian internal. Sistem pengendalian internal dalam implementasinya juga harus diuji keefektifannya. Penentuan apakah pengendalian telah dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah dibuat dan apakah implementasinya sudah sesuai dengan kekuatan dan kualifikasi yang dibutuhkan untuk mengimplementasikan secara efektif dan tujuan dari pelaksanaan pengujian pengendalian internal. Arens (2008) menyatakan jika pengendalian internal kontrol dilaksanakan secara efisien dan efektif, pelaporan keuangan yang dihasilkan secara andal, aset milik daerah tetap aman dan peraturan perundang-undangan diimplementasikan maka akan tercipta pemerintahan yang baik.

Nurillah (2014) menyatakan sistem pengendalian internal berfungsi sebagai panduan implementasi dan perbandingan untuk menguji efektivitas implementasi sistem pengendalian internal di pemerintahan. Pengendalian internal terdiri dari kebijakan dan prosedur yang digunakan untuk mencapai tujuan dan memastikan atau memberikan informasi keuangan yang andal, serta memastikan kepatuhan hukum dan peraturan yang berlaku. Pemerintahan yang memiliki sistem pengendalian internal yang lemah, maka laporan keuangan yang dihasilkan tidak dianggap wajar oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK).

Selain itu juga faktor ke empat yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan adalah peran audit internal. Audit internal juga mempunyai pengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Pratama, 2017). Audit internal merupakan pengawasan internal pemerintah yang dapat membantu menyiapkan laporan keuangan yang berkualitas dan kehandal. Peraturan BPK menyebutkan bahwa dalam melakukan pemeriksaan laporan yang dapat digunakan Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah (APIP), tenaga ahli dan atau tenaga pemeriksaan di luar BPK untuk meningkatkan koordinasi dan kerja sama, serta mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan. Hal ini dimungkinkan karena pada prinsipnya pemeriksaan yang dilakukan oleh internal pemerintah memiliki tujuan untuk mendorong tata kelola pemerintah yang baik.

Selain itu faktor ke lima yang mempunyai pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah adalah kompetensi sumber daya manusia. Kompetensi sumber daya manusia yang diperoleh melalui proses pembelajaran. Kegiatan pembelajaran memungkinkan seorang individu memperoleh berbagai makna, keterampilan, sikap dan perilaku. Untuk menyiapkan laporan keuangan berkualitas maka diperlukan kompetensi sumber daya manusia yang memadai. Dengan ini menerangkan bahwa kompetensi yang dimiliki pegawai manajemen keuangan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan (Fikri, Made, & Wirshandono, 2016). Sumber daya manusia yang berkualitas dapat menghemat waktu pembuatan laporan keuangan, karena sumber daya manusia tersebut telah mengetahui dan memahami apa yang akan dikerjakan dengan baik, sehingga penyajian laporan keuangan bisa terselesaikan tepat waktu. Semakin cepat waktu penyajian laporan keuangan, maka semakin baik untuk pengambilan keputusan (Masitoh, Sarifah, & Apriyanti, 2020).

Pemerintah Kabupaten Musi Rawas salah satu kabupaten yang masih mencapai penilaian WTP atas laporan keuangan pemerintah daerah selama 6 tahun berturut-turut dari Tahun 2014-2020. Pemerintah kabupaten Musi Rawas mampu mempertahankan opini WTP atas laporan keuangan pemerintah daerah. Penilaian yang diberikan BPK membuktikan jika laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Musi Rawas sudah disajikan

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

secara wajar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebelumnya laporan keuangan daerah Kabupaten Musi Rawas memperoleh opini WDP dan di tahun 2015 juga memperoleh WDP. Ini membuktikan jika kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Musi Rawas belum sesuai dengan peraturan yang berlaku di tahun sebelumnya dan tahun 2015. Adanya inskonsistensi Pemerintah Kabupaten Musi Rawas sebagaimana tercermin dalam hasil audit BPK yang merupakan salah satu topik menarik untuk diteliti mengenai faktor-faktor yang diduga dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah tersebut antara lain adalah penerapan *good governance*, sistem akuntansi keuangan, sistem pengendalian internal, peran audit internal, dan penerapan kompetensi sumber daya manusia.

Berdasarkan penelitian terdahulu berkaitan dengan kejadian yang telah banyak dilakukan di daerah. Beberapa penelitian juga menyampaikan beberapa faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Yusniar et al (2016) dalam penelitiannya menyatakan bahwa *good governance*, sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah, sistem pengendalian internal secara simultan berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Menurut Ternalemta et al (2021) menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian internal, kompetensi sumber daya manusia secara simultan berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Jauhari et al (2021) menyatakan bahwa sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Ternalemta et al (2021) menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian internal, dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Berbeda dengan penelitian Zeyn (2011) menyatakan bahwa *good governance* tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan daerah. Penelitian Ihsanti (2014) menyatakan sistem akuntansi keuangan tidak berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Heda dan Aulia (2017) menyatakan sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, disebabkan karena adanya kelemahan pada komponen lingkungan pengendalian yang kurang komitmen terhadap kompetensi dan belum optimal secara penegakan integritas dan nilai etika, serta kepemimpinan yang belum kondusif dan kurangnya hubungan yang baik dengan instansi lain serta kegiatan pengendalian yang lemah atas pengelolaan sistem informasi dan pengendalian fisik serta pembatasan akses dan akuntabilitas atas sumber daya dan pencatatan lemah, serta komponen pemantauan yang belum optimal. Penelitian Shetwi et al (2011) menyatakan peran audit internal tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang berarti kurangnya pengawasan untuk mengevaluasi kualitas laporan keuangan, sehingga menyebabkan laporan keuangan tidak relevan. Sama halnya dengan penelitian Pinem (2015) menyatakan bahwa SDM tidak berpengaruh secara parsial terhadap kualitas laporan keuangan karena kondisi kapasitas SDM yang belum mendukung dengan baik. Seperti sebagian besar pegawai penatausahaan bagian keuangan tidak memiliki latar belakang pendidikan akuntansi. Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan diatas, maka masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah: (1) Pengaruh *good governance* terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah; (2) Pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah; (3) Pengaruh sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah; (4) Pengaruh penerapan internal audit terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah; (5) Pengaruh kompetensi SDM terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah.

TELAAH LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Teori Agensi

Teori keagenan adalah teori yang menjelaskan hubungan antara agen dan prinsipal, dimana agen merupakan manajer perusahaan atau pihak pemilik perusahaan. Teori keagenan muncul sebagai akibat dari konflik kepentingan antara prinsipal dan agen. Hubungan keagenan sebagai kontrak di mana satu orang atau lebih mempekerjakan orang lain untuk bertindak atas nama prinsipal, dimana agen diberikan kewenangan untuk membuat keputusan terbaik bagi kepala SKPD (Prinsipal) (Jensen & Meckling, 1976). Selain itu dijelaskan bahwa karena kepentingan prinsipal dan agen berbeda, maka agen tidak selalu menuruti keinginan prinsipal, dan agen diberi imbalan berupa insentif dengan harapan dia mau bekerja atau bertindak atas permintaan klien. Pemilik perusahaan atau klien mengharapkan ini dalam hubungan agensi Administrator (agen) yang dapat menyelesaikan yang menguntungkan pemilik perusahaan atau klien, terutama keuangan. Isu keagenan muncul ketika manajemen (agen) membuat kebijakan keputusan yang merugikan pemilik (prinsipal) perusahaan (Ismiyanti & Hanafi, 2004). Permasalahan lembaga ini dapat terjadi baik di organisasi swasta maupun publik. Manajemen menghadapi masalah untuk memastikan bahwa perilaku karyawan adalah apa yang mereka inginkan. Perusahaan dimiliki oleh manajer, tetapi masalahnya selalu ada pada pemilik untuk memastikan tindakan manajer sesuai dengan keinginannya (Stiglitz, 1999).

Hubungan teori keagenan dalam pengelolaan laporan keuangan daerah dari penelitian ini adalah sebagai agen yang harus mempertanggungjawabkan kepada masyarakat umum dalam bentuk laporan keuangan yang

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

berkualitas. Laporan keuangan yang berkualitas dapat mengurangi asimetri informasi antara pemerintah dengan masyarakat. Pengawasan juga diperlukan untuk meredam konflik antara pemerintah sebagai agen dan masyarakat sebagai principal (Girsang et al., 2015). Pengawasan dilakukan dengan penyampaian laporan keuangan yang berkualitas dan keterbukaan informasi kepada publik. Ada beberapa strategi untuk membuat laporan keuangan berkualitas tinggi. Namun dalam penelitian ini, laporan keuangan dapat berkualitas tinggi jika didukung oleh tata pengelola keuangan yang baik, sistem akuntansi keuangan, sistem pengendalian yang baik, internal audit yang handal dan staf yang kompeten.

Good Governance

Pengertian dari *good governance* adalah pengelolaan pemerintahan yang baik. Tata kelola yang baik pertama kali digunakan dalam Laporan Pembangunan Dunia 1989. Laporan ini menyebutkan *good governance* dalam pengertian *good governance* dan *clean governance*. Tata pemerintahan yang baik pada dasarnya merupakan suatu konsep yang berkaitan dengan proses pengambilan keputusan dan pelaksanaannya, yang dapat dipertimbangkan secara bersama-sama.

Osborne dan Gaebler (1992), LAN dan BPKP (2000) menyatakan bahwa *good governance* adalah pengendalian pemerintah yang solid dan bertanggung jawab, yang efisien dan efektif dengan menjaga sinergi interaksi konstruktif antar domain. Tata kelola yang baik adalah proses yang digunakan untuk meningkatkan kinerja dan akuntabilitas dalam jangka panjang, baik berdasarkan nilai-nilai hukum dan etika.

Karakteristik pelaksanaan *good governance* (Mardiasmo, 2002) adalah:

- a. Partisipasi berarti keterlibatan seseorang dalam situasi baik secara mental, pikiran atau emosi dan perasaan yang mendorongnya untuk usaha dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan dan ikut bertanggung jawab terhadap kegiatan mencapai tujuan tersebut.
- b. Keadilan, adanya kerangka hukum yang harus diterapkan secara adil dan mandiri oleh semua orang, termasuk hukum hak asasi manusia. Hal ini tentunya menjadi prasyarat bagi terciptanya *good governance* dalam penegakan hukum.
- c. Transparansi, semua informasi tentang proses pemerintahan harus tepat dan jujur sehingga seluruh masyarakat dapat memahami, mengakses dan memantaunya.
- d. Bersama-sama untuk meningkatkan dan menjaga kesejahteraan.
- e. Akuntabilitas Semua keputusan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik dan pihak-pihak yang berkepentingan.

Penerapan *good governance* tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas keuangan pemerintah daerah. Penelitian ini didukung oleh penelitian Zayn (2011). Kesuma dan Darmans (2017) menyatakan bahwa penerapan *good governance* tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan kementerian pariwisata. Penelitian Yusniar, Darwanis dan Abdullah (2016) penerapan *good governance* berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan dan didukung oleh penelitian Agung dan Mulyani (2020) penerapan *good governance* berdampak signifikan terhadap kinerja laporan keuangan daerah di Kabupaten/Kota Jawa Barat. *Good governance* berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi penerapan *good governance* pada pemerintah akan memberikan kontribusi yang baik dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah. Dari penjelasan tersebut dapat dibuat hipotesis sebagai berikut:

H1 : Penerapan *Good Governance* berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Sistem akuntansi keuangan sangat diperlukan oleh pemerintah sebagai organisasi sektor publik agar pemerintah berjalan lebih efektif, efisien, bersih dan transparan. Sistem akuntansi keuangan daerah merupakan kegiatan pelayanan yang menyediakan informasi yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan. Pengambil keputusan terkait dengan keputusan di arena sosial, politik dan ekonomi. Dalam pengelolaan keuangan daerah, pemerintah memerlukan sistem akuntansi yang diperlukan untuk mengelola dana dan transaksi.

Penerapan sistem akuntansi keuangan daerah bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan kredibilitas LKPD. Penerapan sistem akuntansi keuangan daerah yang belum memadai dapat membuat kualitas laporan keuangan yang dihasilkan kurang relevan dengan pengambilan keputusan dan kurang dapat di andalkan. Penelitian Hanifa (2016) yang menyatakan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah tidak terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Penerapan kesatuan sistem akuntansi keuangan daerah meminimalkan kemungkinan terjadinya kesalahan akuntansi keuangan dan laporan. Pemerintah daerah juga perlu menerapkan sistem akuntansi keuangan daerah yang kredibel agar dapat menghasilkan laporan keuangan pemerintah yang relevan dan andal.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Akuntansi yang buruk mengurangi kredibilitas laporan keuangan yang dihasilkan dan mengurangi relevansinya dalam pengambilan keputusan. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dibuat hipotesis sebagai berikut:

H2 : Sistem Akuntansi Keuangan berpengaruh negatif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Sistem Pengendalian Internal

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah mendefinisikan sistem pengendalian internal sebagai berikut: “Suatu proses keterpaduan tindakan dan kegiatan yang terus menerus dilakukan oleh manajemen dan seluruh karyawan untuk memastikan bahwa tujuan organisasi tercapai dengan baik melalui kegiatan yang efektif dan efisien. Berdasarkan definisi pengendalian internal dapat dikatakan sebagai suatu proses yang dilaksanakan untuk mengawasi, mengarahkan dan mengukur suatu organisasi agar tidak terjadinya penyimpangan.

Penelitian yang dilakukan oleh Henda dan Aulia (2017) menyatakan bahwa sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Berbeda dengan penelitian Yusniat et al (2016) menyatakan bahwa sistem pengendalian intern berdampak positif terhadap kualitas LKPD dan di dukung oleh penelitian Ichlas et al (2014) menyatakan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap akuntabilitas laporan keuangan. Penerapan sistem pengendalian internal pemerintah adalah untuk memastikan bahwa standar akuntansi pemerintah diterapkan dengan benar dan mencapai kualitas yang relevan, andal, sebanding, dan dapat dipahami sesuai kebutuhan. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa sistem pengendalian mempengaruhi kualitas laporan keuangan.

H3 : Sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

Peran Audit Internal

Audit internal adalah pemeriksaan atas laporan keuangan tahunan pemerintah daerah dan dokumen pembukuan yang dilakukan oleh auditor internal pemerintah, untuk mematuhi pedoman manajemen puncak tertentu dan peraturan negara. Audit internal adalah analisis, evaluasi, rekomendasi dan komentar mengenai kegiatan yang diselidiki.

Berdasarkan undang-undang Nomor 15 Tahun 2004, bahwa pemeriksaan yang dilakukan dalam pengelolaan tanggung jawab atas keuangan negara tidak semata-mata dapat dilakukan dalam waktu yang sangat singkat, karena pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK memanfaatkan hasil dari pemeriksaan pengawasan internal pemerintah dapat membantu mempermudah pemeriksaan keuangan pemerintah daerah.

Studi yang dilakukan oleh Yuliani et al (2010) dan (Fikri, 2015) tentang peran audit internal dalam kaitannya dengan kualitas pelaporan keuangan menunjukkan bahwa peran audit internal berdampak positif terhadap peningkatan kualitas pelaporan keuangan. Dengan proses pengawasan yang lebih baik terhadap kegiatan audit internal instansi pemerintah, tentunya akan meningkatkan kualitas informasi pelaporan keuangan SKPD. Dari teori di atas dapat dikatakan bahwa audit internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan tahunan.

H4: Peran audit internal berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

Kompetensi SDM

Kemampuan seseorang atau individu pada suatu organisasi adalah kemampuan untuk keterampilan, pengetahuan, dan keahlian yang dibutuhkan untuk melakukan tugas. Kemampuan sumber daya manusia dengan pengetahuan akuntansi memahami apa yang harus dilakukan dengan laporan keuangan. Kemampuan adalah kemampuan untuk melakukan suatu pekerjaan atau tugas berdasarkan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk pekerjaan itu dan sikap pekerjaan itu (Wibowo, 2007). Kemampuan mengacu pada tingkah laku atau tingkah laku peran yang diperlukan seseorang untuk melakukan pekerjaannya secara memuaskan (Dharma, 2004).

Kemampuan individu saat ini memiliki lima karakteristik yaitu:

- a. Melakukan tugas adalah kemampuan yang terkait dengan kinerja yang baik. Kemampuan untuk melakukan tugas ditunjukkan melalui berorientasi pada hasil, manajemen kinerja, pengaruh, inisiatif, inovasi, dan pengetahuan teknis.
- b. Hubungan yang lahir adalah keterampilan yang berhubungan dengan berkomunikasi dengan orang lain, bekerja, dan memenuhi kebutuhan mereka. Kemampuan yang berhubungan dengan hubungan termasuk kerjasama, orientasi pelayanan, dukungan interpersonal, dan penyelesaian perselisihan.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

- c. Sifat-sifat individu adalah kemampuan esensial seseorang dan berhubungan dengan bagaimana orang berpikir, merasa, belajar, dan tumbuh. Karakteristik individu adalah kemampuan untuk memasukkan kejujuran dan integritas, pengembangan diri, penegasan diri, kualitas pengambilan keputusan, pemikiran analitik, dan pemikiran konseptual.
- d. Manajemen adalah keterampilan yang secara khusus berhubungan dengan membimbing, memantau, dan memelihara orang lain. Keterampilan kepemimpinan yang memotivasi, memberdayakan, dan memelihara orang lain.

Sumber daya manusia memiliki kualitas yang sangat baik untuk memahami akuntansi keuangan sesuai dengan tanggung jawabnya. Sumber daya manusia (SDM) yang berkompoten harus dapat berfungsi secara optimal dengan tujuan menjamin terselenggaranya pemerintahan daerah dengan baik. SDM memiliki kemampuan akuntansi yang tercermin dalam laporan keuangan yang dihasilkan. Oleh karena itu, kemampuan sumber daya manusia di dalam laporan keuangan berkualitas tanpa adanya salah saji yang signifikan. Penelitian (Ternalemta, Kalangi, & Tinangon, 2021) kompetensi sumber daya berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan dan didukung oleh Desina dan Bayu (2014) menunjukkan bahwa keterampilan bakat memiliki dampak positif pada kualitas laporan keuangan. Dengan kata lain, semakin baik bakat Anda, semakin baik kualitas laporan keuangan daerah Anda. Berdasarkan teori diatas maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H5 : Kompetensi sumber daya berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Karakteristik Kualitas Laporan Keuangan

Kualitas laporan keuangan untuk memenuhi kebutuhan pengguna sekaligus melindungi pemilik berdasarkan karakteristik kualitatif informasi keuangan dan pengungkapan yang lengkap dan wajar. Karakteristik kualitatif laporan keuangan tahunan merupakan indikator normatif yang harus dicantumkan dalam informasi akuntansi untuk mencapai tujuan tersebut (Yadiati & Abdullah, 2017). Empat karakteristik berikut merupakan persyaratan normatif bagi pelaporan keuangan pemerintah untuk mencapai kualitas laporan keuangan yang terdiri dari:

- a. Relevan
Informasi yang terkandung dalam laporan keuangan dapat dipengaruhi oleh keputusan pengguna dengan membantu penilaian peristiwa masa lalu atau saat ini, proyeksi masa depan, dan penelaahan atau revisi hasil penilaian masa lalu. dianggap relevan. Oleh karena itu, kesimpulan yang relevan dapat dikaitkan dengan maksud pengguna.
- b. Andal
Keandalan lahir Informasi dalam laporan keuangan bebas dari informasi yang salah secara material dan menyesatkan, dan semua fakta adalah benar dan dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika sifat atau tampilannya tidak dapat diandalkan, penggunaan informasi tersebut berpotensi dapat diandalkan dan penggunaan informasi tersebut dapat berpotensi menyesatkan.
- c. Dapat dibandingkan
Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal yang dilakukan apabila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintahan akan menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.
- d. Dapat dipahami
Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan.

Metode Penelitian

Obyek penelitian yang akan diteliti yaitu *good governance*, sistem akuntansi keuangan daerah, sistem pengendalian internal, peran audit internal dan kompetensi SDM sebagai variabel independen, kualitas laporan keuangan daerah sebagai variabel dependen. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif.

Populasi dan Sampel

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Populasi merupakan kelompok elemen yang lengkap, yang berupa orang, objek, transaksi, dan kajian yang mempelajari objek penelitian. Survei ini menggunakan populasi sebanyak 26 OPD yang ada di kabupaten Musi Rawas dengan jumlah 19 Dinas, 6 Badan, 1 Inspektorat. Populasi pada penelitian ini sebanyak 104 orang yang terdapat pada 26 satuan kerja yang nantinya akan di jadikan sebagai responden. Sampel yang diambil setiap OPD 4 orang penatausahaan yaitu Kasubag Kepegawaian, Kasubag Keuangan, Bendahara Pengeluaran dan staf penatausahaan yang terlibat langsung dalam perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pelaporan, serta pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah pada OPD di Kabupaten Musi Rawas Sumatera Selatan.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner yang diisi atau dijawab oleh responden yang merupakan pegawai bagian akuntansi atau perbendaharaan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengajukan serangkaian pertanyaan kepada responden berbentuk kuesioner.

Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah SEM berbasis partial least squares (PLS) dengan menggunakan software PLS berbasis komponen atau varian. Model persamaan struktural (SEM) adalah bidang penelitian statistik yang dapat menguji banyak hubungan yang relatif sulit diukur pada saat yang bersamaan.

Metode analisis data menggunakan software ini terdiri dari beberapa langkah:

1. Desain model struktural (inner model) menunjukkan hubungan atau kekuatan estimasi antara variabel laten atau konstruk berdasarkan teori substansi (Ghozali & Latan, 2015).
2. Desain model pengukuran (outer model), model eksternal dijalankan untuk mengevaluasi validitas dan reliabilitas model. Ada tiga kriteria untuk mengevaluasi model pengukuran model eksternal: validitas konvergen, validitas diskriminatif, dan reliabilitas majemuk (Ghozali & Latan, 2015).

PEMBAHASAN HASIL

Pengujian Validasi

Indikator dengan *loading* dari 0,50 dan 0,70 sebaiknya dianalisis agar bisa mengetahui dampak dari keputusan menghapus indikator tersebut pada AVE dan *composite reliability*. Indikator *loading* 0,50 masih dapat digunakan dan indikator 0,70 tersebut dapat meningkatkan AVE dan *composite reliability* di atas batasannya (Mahfud dan Ratmono, 2013). Nilai batasan AVE adalah 0,50 dan *composite reliability* sebesar 0,70. Indikator dengan *loading* yang kecil kadang tetap dipertahankan karena punya kontribusi pada validitas.

	Cronbach's Alpha	rho_A	Composite Reliability	Average Variance Extracted (AVE)
X1	0.929	0.941	0.949	0.789
X2	0.940	0.940	0.954	0.807
X3	0.971	0.974	0.977	0.897
X4	0.867	0.871	0.904	0.655
X5	0.927	0.927	0.945	0.776
Y	0.883	0.893	0.914	0.681

Pengujian Reliabilitas

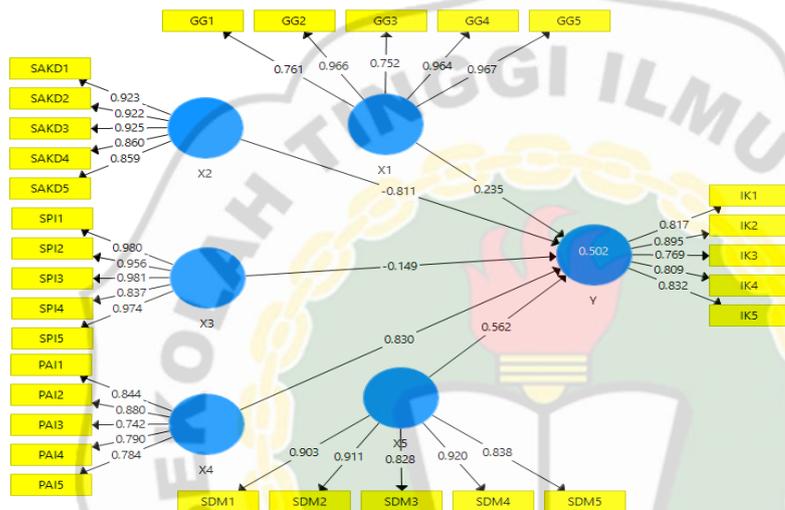
Sedangkan pengujian reliabilitas dinilai berdasarkan *alpha cronbach* dan *composite reliability*. Nilai untuk masing-masing variabel laten diatas 0,70 dikatakan reliabel.

	Cronbach's Alpha	rho_A	Composite Reliability	Average Variance Extracted (AVE)
X1	0.929	0.941	0.949	0.789
X2	0.940	0.940	0.954	0.807
X3	0.971	0.974	0.977	0.897
X4	0.867	0.871	0.904	0.655
X5	0.927	0.927	0.945	0.776
Y	0.883	0.893	0.914	0.681

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

PENGUJIAN HIPOTESIS

	Original Sampl...	Sample Mean (...)	Standard Devia...	T Statistics (O...	P Values
X1 -> Y	0.235	0.234	0.079	2.961	0.003
X2 -> Y	-0.811	-0.824	0.231	3.517	0.000
X3 -> Y	-0.149	-0.142	0.083	1.791	0.074
X4 -> Y	0.830	0.836	0.158	5.238	0.000
X5 -> Y	0.562	0.575	0.223	2.515	0.012



Hasil tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Nilai koefisien pengaruh (X1) memiliki pengaruh positif 0,235 dan *P-Value* berpengaruh sebesar 0,003, yang berarti bahwa X1 memiliki pengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.
2. X2 untuk memiliki -0,811 dan untuk *P-Value* signifikan sebesar 0,000. X2 memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.
3. X3 untuk terdapat -0,149 dan untuk *P-Value* tidak signifikan sebesar 0,074 yang dimana X3 tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.
4. X4 sebesar 0,830 dan untuk *P-Value* sebesar 0,000 yang berarti bahwa X4 berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.
5. X5 sebesar 0,562 dan *P-Value* sebesar 0,012 yang dimana X5 berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis data dan pembahasan yang dilakukan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Penerapan *Good Governance* berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Musi Rawas. Yang berarti bagus penerapan *good governance* maka semakin bagus pula kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Tujuannya agar pengelolaan keuangan dilakukan secara transparan dan dipertanggungjawabkan sehingga tercipta akuntabilitas publik yang menciptakan kesejahteraan masyarakat.
2. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh negatif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Musi Rawas. Sistem akuntansi keuangan daerah kabupaten Musi Rawas kurang mampu memberikan kontribusi yang cukup dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan, sehingga belum mencapai tingkat maksimal yang diharapkan. Kondisi ini kurang optimal yang mengakibatkan perlu adanya peningkatan lagi sesuai dengan apa yang diharapkan.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

3. Sistem Pengendalian Internal tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Musi Rawas. Artinya semakin baiknya proses kegiatan review dan pengawasan oleh internal audit namun tidak independensi dan sesuai kemampuan maka hasil rekomendasi atas laporan keuangan yang diaudit belum bisa disajikan secara berkualitas.
4. Peran Audit Internal berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Musi Rawas. Adanya peran audit internal dapat membantu pemerintah dalam menyiapkan laporan keuangan yang berkualitas dan andal.
5. Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Musi Rawas. Artinya jika kompetensi sumber daya manusia dilaksanakan dengan baik, maka kualitas laporan keuangan daerah akan meningkat, sehingga laporan keuangan yang baik dapat memenuhi karakteristik kualitas laporan keuangan.



PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

DAFTAR PUSTAKA

- Amila, Y. H., Sasongko, N., & Bayu, A. B. (2019). Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Peran Internal Audit, dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada SKPD Di Pemerintah Kabupaten Sukoharjo). *Jurnal Megister Akuntansi*.
- Andini, D., & Yusrawati. (2015). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Empat Lawang Sumatera Selatan. *Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, 24(1), 65-82.
- Arens, A. (2008). *Auditing dan Jasa Assurance Pendekatan Terintegrasi* (1 ed.). Jakarta Erlangga.
- Azlim, Darwanis, & Usman. (2012). Pengaruh Penerapan Good Governance dan SAP Terhadap Kualitas Informasi Keuangan SKPD di Kota Banda Aceh. *Jurnal Akuntansi ISSN 2302-0164 Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*.
- Bastian, I. (2010). *Akuntansi sektor publik*. Jakarta: Erlangga.
- Bastian, I. (2015). *Akuntansi Sektor Publik*. Dalam Erlangga. Jakarta.
- Cadbury, A. (1992). The Code of Best Practice Report of the Committee on the Financial Aspects of Corporate Governance. *Gee and Co Ltd*, 27.
- Cohen, J., Krishnamoorthy, G., & Wright, A. (2004). The Corporate Governance Mosaic and Financial Reporting Quality. *Journal of Accounting Literature*, 87-152.
- Evi, C. S., & Setiawina, N. (2016). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*, 5(3), 403-428.
- Fikri, D., Made, A., & Wirshandono, D. (2016). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Journal Riset Mahasiswa Akuntansi (JRMA)*, 4(2), 21-40.
- Fitrika, C. S., & Rosmeiwati, T. (2019, Juli-Desember). Pengaruh Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah, Peran Audit Internal, dan Kompetensi Sumberdaya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Kantor Distrik Navigasi Kota Sabang. *Jurnal Akuntansi Muhammadiyah*.
- Ghozali, I., & Latan, H. (2015). Partial Least Square Konsep, Teknik Dan Aplikasi menggunakan Program SmartPLS 3.0 (Untuk Penelitian Empiris). *Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro*.
- Ichlas, M., Dr. Basri, H., & Dr. Arfan, M. (2014, November). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Kota Banda Aceh. *Jurnal Megister Akuntansi*, 3(4), 10.
- Ihsanti, E. (2014). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi Empiris pada SKPD Kab. Lima Puluh Kota). *Jurnal Akuntansi*.
- Irwan, D. (2011). Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Keterampilan Sumber Daya Manusia dan Penerapan Standar Akuntansi Negara Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Megister Administrasi Bisnis dari Universitas Negeri Padang*.
- Ismiyanti, F., & Hanafi, M. (2004). Struktur Kepemilikan, Risiko, dan Kebijakan Keuangan: Analisis Persamaan Simultan. *Journal of Indonesia Economy and Business*, 19(2).
- Jauhari, H., Hazisma, S., & Dewata, E. (2021, Jakarta). Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah. *Jurnal Akuntansi*, 8(1).
- Jensen, M., & Meckling, W. (1976). Theory Of The Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. *Journal Of Financial Economics*, 3(4), 305-360.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Kesuma, D. A., & Darmans. (2017). Pengaruh Good Governance, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem Pengendalian, Internal Pemerintahan Kompetensi Aparatur Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Pada Satuan Kerja.

Krismiaji. (2002). *Sistem Informasi Akuntansi*. Yogyakarta: AMP YKP.

Leviany, T., & Roja'i, M. (2016). Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Propinsi Sumatera Selatan Berdasarkan Hasil Pemeriksaan BPK-RI Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2015. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 4(1), 885-894.

Mahmudi. (2010). Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah-Panduan Bagi Eksekutif, DPRD, dan Masyarakat Dalam Pengeambilan Keputusan Ekonomi, Sosial Dan Politik. *Unit Penerbitan dan Pencetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN*.

Mardiasmo. (2002). Akuntansi Sektor Publik.

Mardiasmo. (2007). *Akuntansi Sektor Publik* (3 ed.). Yogyakarta: Andi Offset.

Masitoh, S., Sarifah, D. T., & Apriyanti, E. (2020, November). Pengaruh Penerapan Good Government Governance dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi Kasus pada Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Barat dan Banten). *Jurnal Ekonomi STIEP*, 5(2).

Nyoto, H., & Fadzil, F. (2011). Fical Decentralization after Implementation of Local Government Autonomy in Indonesia. *Word Review of Business Research*, 1(2), 51-57.

Oktaviani, V. (2012). Akuntansi Keuangan Daerah. *Jurnal Akuntansi*.

Pratama, A. (2017). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, dan Penerapan Audit Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Jurnal STIE Perbanas Surabaya*.

Stiglitz, J. (1999). *Economics of The Publik Sector* (3rd edition). New York NY: W. W. Norton & Company.

Ternalemta, Kalangi, L., & Tinangon, J. (2021). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Akuntansi Berbasis Akrua, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing*, 12(1).

Trnalemta, Lintje, K., & Jantje, J. (2021). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Akuntansi Berbasis Akrua, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Jurnal Riset Akuntansi DAN aUDITING*, 12(1).

Warren, C., James M, R., & Philip E, F. (2005). *Pengantar Akuntansi* (21 ed.). Jakarta: Salemba Empat.

Yadiati, W., & Abdullah, M. (2017). Kualitas Pelaporan Keuangan. Jakarta: Kencana Prenada Media Group,.

Yasma, A. H., Noer, S., & Andy, D. B. (2019). Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Peran Internal Audit dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo. *Jurnal Magister Akuntansi*.

Yuliani, S., Nadirsyah, N., & Bakar, U. (2010). Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah Dan Peran Internal Audit Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Kota Banda Aceh). *Jurnal Telaah dan Riset Akuntansi*, 3(2), 206-220.

Yusniar, Darwanis, & Abdullah, S. (2016). Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah dan Pengendalian Intern Terhadap Good Governance dan Dampaknya Pada Kualitas Laporan Keuangan (Studi Kasus Pada SKPA Pemerintah Aceh). (2, Penyunt.) *Jurnal Megister Akuntansi*, 5, 100-115.

Zayn, E. (2011). Pengaruh Good Governance Dan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Keuangan Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Pemoderasi. *Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan*, 1(1), 21-37.